

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

□ Kabupaten Bogor bukan merupakan daerah yang masuk kedalam penghitungan IHK di Jawa Barat. BPS Kabupaten Bogor bekerjasama dengan Bappedalitbang hanya menghitung inflasi sampai dengan Bulan September 2019, sedangkan dari Bulan Oktober 2019 s/d Bulan Nopember 2020 tidak menghitung inflasi, sehingga TPID Kabupaten Bogor terkait inflasi mengambil data dari sistercity daerah IHK yaitu Kota Bogor. □ Untuk triwulan III tahun 2021 (Juli s.d September 2021) tingkat inflasi di Kota Bogor dilihat dari data inflasi bulanan cenderung fluktuatif. Inflasi Triwulan III Kota Bogor (bulan Juli s.d. September) mencapai 0,15%, untuk bulan Juli (0,07%) dimana Kota Bogor menempati urutan ke lima di Jawa Barat sementara inflasi di bulan Agustus (0,08%) menempati urutan ke empat tertinggi Inflasi diantara 7 Kota IHK di Jawa Barat, pada Bulan September Kota Bogor mengalami Deflasi sebesar (0,10%). Pada bulan Agustus 2021 IHK Kota Bogor mengalami penurunan, dari 108,32 di Agustus 2021 menjadi 108,21 di bulan September 2021 (2018=100). Dengan demikian terjadi deflasi sebesar 0,10 persen. □ Berdasarkan data harga rata-rata komoditas di Kabupaten Bogor pada periode Juli-September 2021, dari 16 komoditas yang dipantau harganya setiap minggu di tingkat pedagang, 1 komoditas mengalami fluktuatif harga yaitu Cabai Rawit Merah. Sementara 15 komoditas lainnya yaitu Beras Premium, Beras Medium, Gula Pasir, Minyak Goreng Curah, Tepung Terigu, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit Hijau, Jagung Pipilan, Kacang Kedelai, Daging Ayam Ras, Daging Sapi (Murni) dan Telur Ayam Ras dalam kondisi stabil. Pasokan Cabai Rawit Merah berasal dari Pasar Induk TU, Pasar Induk Kemang dan Pasar Induk Tangerang.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

□ Nilai inflasi dihitung oleh BPS hanya untuk level Kota sehingga nilai Inflasi Kabupaten Bogor masih mengacu kepada nilai Inflasi Kota Bogor.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

□ Pengamanan ketersediaan pasokan Bahan Pokok dan langkah pengendalian Inflasi Daerah Triwulan III Tahun 2021 yaitu: a) Kegiatan Gelar Pangan Murah dan Pemantauan harga diantaranya : □ Melaksanakan Gelar Pangan Murah pada tanggal 5-6 Juli 2021 yang dilaksanakan di Halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor □ Pemantauan Harga pada tanggal 24 September 2021 di Pasar Cigombong dan 28 September 2021 di Pasar Leuwiliang. b) Pada masa Pandemi Covid-19, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tidak melaksanakan Bazar, tetapi melaksanakan kegiatan pelatihan pembinaan usaha mikro kepada pelaku usaha dan memfasilitasi kemudahan perizinan Usaha Mikro. c) Bantuan sarana dan prasarana pertanian (benih, pupuk, obat-obatan dan alsintan) oleh Dinas Pertanian Holtikultura dan Perkebunan. d) Pembangunan / perbaikan jaringan irigasi oleh Dinas Pertanian Holtikultura dan Perkebunan. e) Gerakan membeli produk lokal (beras carita makmur) untuk seluruh ASN Kabupaten Bogor oleh Dinas Pertanian Holtikultura dan Perkebunan bekerjasama dengan Perumda Pasar Tohaga. □ Di tengah Pandemi Covid-19, ketersediaan pangan menjadi hal yang krusial. Isu yang menjadi perhatian utama adalah distribusi kebutuhan pokok masyarakat dari sentra produksi ke pasar hingga konsumen. Hal yang dilakukan Kabupaten Bogor adalah : □ Optimalisasi fungsi pasar untuk distribusi barang dan menjaga stabilitas harga. □ Mendorong transaksi online melalui kerja sama antara pasar tradisional dan e-commerce dan perbankan. □ Penguatan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) untuk memperluas akses informasi harga pangan.

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

4.

Evaluasi Distribusi Bahan Pokok Dan Upaya Stabilisasi Harga diantaranya : □ Perlunya optimalisasi sinkronisasi program kerja terkait pengendalian harga antar lembaga/ instansi terkait. □ Minimnya dukungan pasokan data pantauan harga pangan strategis di Kabupaten Bogor. □ Perlunya kemudahan distribusi melalui promosi dan pemasaran secara digital.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

□ Membuat aplikasi terkait stok harga kebutuhan pokok masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor. □ Pengembangan program Inklusi keuangan pada sektor Pertanian, Peternakan maupun UMKM Kabupaten Bogor. □ Mendorong transaksi keuangan secara digital baik di lingkungan pemerintah maupun di masyarakat.